

# PROPOSAL

# 2010

Para pimpinan daerah merupakan penentu keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakyat dan pencapaian MDGs bangsa Indonesia. "Gubernur, Bupati dan Walikota adalah agen perubahan, perannya sangat penting dalam proses pembangunan kesejahteraan rakyat".

(HR. Agung Laksono-Menkokesra dalam acara Leadership MDGs Award, di TVRI Nasional 23 Desember 2009).

## **KAJIAN STRATEGIK 50 LEADERSHIP DAERAH MENUJU MDGs INDONESIA 2010 - 2015**

# KAJIAN STRATEGIK 50 LEADERSHIP DAERAH MENUJU MDGs INDONESIA 2010 - 2015

## 1. Latar Belakang

### Peran Kepemimpinan Daerah Dalam Pembangunan Kesejahteraan

Tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) merupakan cita-cita mulia dari hampir semua negara. Cita-cita ini didasari kenyataan bahwa pembangunan yang hakiki adalah pembangunan manusia, sehingga pembangunan manusia harus menjadi landasan pelaksanaan pembangunan negara-negara di dunia yang menyepakati deklarasi milenium PBB tersebut.

Indonesia sebagai salah satu dari 189 negara yang menandatangani, menunjukkan komitmen besar untuk mencapai target yang ditetapkan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015.

Namun, capaian pembangunan milenium atau MDGs di Tanah Air tampaknya mengalami kemunduran. Laporan *A Future Within Reach* (2006) menempatkan Indonesia di kelompok bawah bersama Banglades, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Niugini, dan Filipina (Kompas, 3/3/2007). Menurut Human Development Report 2007-2008, Indonesia berada di ranking 107.

Kemunduran ini boleh jadi karena adanya transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Di jaman orde baru, pemerintah mendemonstrasikan kewenangan sentralisasi absolut. Namun di orde reformasi, hanya beberapa hal yang menjadi urusan pemerintah yaitu meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Maka, pembangunan kesejahteraan rakyat dengan berbagai macam indikatornya adalah urusan wajib pemerintahan daerah dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Distribusi kewenangan itu menunjukkan intensi pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ditandai dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 yang dilandasi roh melayani sebagai kewajiban. Kemudian diperbaiki dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.

Terdapat tiga misi penting dari konsep otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Otonomi daerah telah memberikan peluang seluas-luasnya kepada entitas pemerintahan daerah untuk melakukan berbagai inovasi dan kebijakan dalam menumbuhkan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menumbuhkan pemberdayaan masyarakat diperlukan pemerintahan daerah yang aktif melakukan berbagai kebijakan dan inovasi. Maka, PP Nomor 28 tahun 2007, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sejumlah 26 urusan wajib yang harus dilakukan. Namun, *output dan outcome* dari urusan-urusan wajib pemerintahan daerah tidak secara eksplisit ditargetkan terwujud dalam jangka waktu tertentu.

Padahal, target, waktu dan sumber daya adalah komponen penting keberhasilan leadership-manajemen dalam bidang apapun, termasuk manajemen pemerintahan. Maka disinilah peran dan kualitas para pimpinan daerah sangat dibutuhkan.

Menkokesra menyebutkan, bahwa para pimpinan daerah merupakan penentu keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakyat dan pencapaian MDGs bangsa Indonesia. "Gubernur, Bupati dan Walikota adalah agen perubahan, perannya sangat penting dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat". (*HR. Agung Laksono-Menkokesra dalam acara Leadership MDGs Award, di TVRI Nasional 23 Desember 2009*).

Demikian pentingnya peran kepemimpinan dalam mengedepankan pencapaian tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat dan tujuan MDGs. Tanpa kepemimpinan dengan kualitas yang memadai, manajemen pemerintahan daerah tidak akan bergerak menuju cita-cita bangsa, tetapi justru menjadi beban bagi masyarakat.

## 2. Maksud, Tujuan dan Output Kajian

### Maksud kajian:

---

Sebagai masukan strategik bagi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia dalam merumuskan rencana strategik pembangunan kesejahteraan rakyat tahun 2011 sampai dengan 2015, yang berasal dari praktek-praktek bagus para Gubernur, Bupati dan Walikota Terpilih dalam mengelola pembangunan kesejahteraan rakyat didaerahnya masing-masing.

## Tujuan Kajian:

---

1. Mendokumentasikan secara nasional langkah-langkah strategik, praktek-praktek bagus dari para Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih yang mengarah pada percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat.
2. Memetakan upaya-upaya inovatif kepemimpinan Pemerintahan Daerah dalam hal keberhasilan dan kendala demi pencapaian Target MDGs Indonesia.
3. Memperoleh kajian strategik penyelenggaraan pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota terpilih yang mengacu kepada tujuan pembangunan milenium sesuai dengan visi misi pemerintahan daerah.

## Output kajian:

---

- a) Diterbitkan buku Kajian Strategik : (Agustus 2010)

### **50 Leadership Daerah Menuju MDGs Indonesia 2010 -2015.**

Muatan buku berisi narasi, data dan fotografi:

- i. Hasil kajian dari seluruh daerah terpilih.
- ii. Rekomendasi strategik pembangunan kesejahteraan rakyat.
- iii. Rekapitulasi pencapaian target MDGs Daerah Terpilih dan Indonesia.
- iv. Dari Para Leader Daerah : Praktek Bagus dan Inovasi dalam Pembangunan Kesejahteraan Rakyat.
- v. Menkokesra: Tantangan Masa Depan : Pembangunan Manusia Indonesia
- vi. Sambutan : Presiden RI

- b) Seminar Nasional : (Agustus 2010 dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI)

### **Belajar dari Kepemimpinan Daerah : Pembangunan Manusia Indonesia Masa Depan**

## **3. Sasaran Kajian : Pemerintah Daerah Terpilih**

---

Mekanisme kajian ini dirancang bottom up, sebuah masukan strategik yang mendokumentasikan praktek-praktek bagus dari sejumlah 50 Gubernur, Bupati dan Walikota yang terpilih secara purposive yang merepresentasikan kriteria propinsi, kabupaten / kota lama, kota metropolitan dan daerah otonom baru yang dipandang layak atau potensial sebagai refleksi keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakyat di tingkat nasional.

Pilihan pemerintah daerah tersebut terdiri dari Propinsi, Kabupaten dan Kota, yaitu sebagai berikut:

### Propinsi terpilih (2):

1. Propinsi Bangka Belitung
2. Propinsi Kalimantan Timur

### Kota terpilih (24):

1. Kota Sabang	13. Kota Malang
2. Kota Tebing Tinggi	14. Kota Kupang
3. Kota Solok	15. Kota Ambon
4. Kota Sawahlunto	16. Kota Makassar
5. Kota Bengkulu	17. Kota Bitung
6. Kota Jambi	18. Kota Kendari
7. Kota Batam	19. Kota Gorontalo
8. Kota Pangkalpinang	20. Kota Palu
9. Kota Serang	21. Kota Palangkaraya
10. Kota Bogor	22. Kota Bontang
11. Kota Pontianak	23. Kota Banjarmasin
12. Kota Yogyakarta	24. Kota Palembang

### Kabupaten terpilih (24):

1. Kabupaten Sragen	13. Kabupaten Bantul
2. Kabupaten Jembrana	14. Kabupaten Lamongan
3. Kabupaten Musi Banyuasin	15. Kabupaten Badung
4. Kabupaten Langkat	16. Kabupaten Bima
5. Kabupaten Halmahera Tengah	17. Kabupaten Alor
6. Kabupaten Kaur	18. Kabupaten Luwu Utara
7. Kabupaten Bangka	19. Kabupaten Wakatobi
8. Kabupaten Cirebon	20. Kabupaten Barito Selatan
9. Kabupaten Sukabumi	21. Kabupaten Kutai Timur
10. Kabupaten Purbalingga	22. Kabupaten Mamuju
11. Kabupaten Kebumen	23. Kabupaten Merauke
12. Kabupaten Kudus	24. Kabupaten Lampung Selatan

#### 4. Ruang Lingkup dan Tahapan Kegiatan

Ruang Lingkup Kegiatan	Jadwal
1. Koordinasi persiapan.	Januari 2010
2. Wawancara dan fotografi dengan Gubernur, Bupati / Walikota dengan jajaran Kepala Dinas untuk memperoleh: <ul style="list-style-type: none"><li>• Informasi kebijakan / program, potensi / kendala pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat daerah / MDGs.</li><li>• Data-data pencapaian MDGs, analisa data kajian.</li></ul>	Maret 2010 sampai dengan Juni 2010
3. Wawancara dan fotografi : Menkokesra dan Mendagri	Juni 2010
4. Kompilasi data kajian	Juli 2010
5. Penyusunan laporan dan produksi buku	Juli 2010
6. <u>Launching buku</u> "50 Leadership Daerah Menuju MDGs Indonesia 2010 -2015" <u>Bersamaan dengan Seminar Nasional</u> : "Belajar dari Kepemimpinan Daerah : Pembangunan Manusia Indonesia Masa Depan"	Agustus 2010 (dalam Rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI)

#### 5. Pelaksana

LeadershipPark Institute bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dibantu oleh Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota Terpilih.

#### 6. Pembiayaan

Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota Terpilih, jika berkenan perlu menyediakan biaya kajian sesuai rencana pembiayaan dalam lampiran.

#### 7. Penutup

Jakarta, 15 Januari 2010

Danang Girindrawardana  
Pimpinan LeadershipPark Institute  
Kontak langsung: 08191 292 9999  
Email: [dananglead@yahoo.com](mailto:dananglead@yahoo.com)